

**PENERAPAN *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA)  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**MUH. NAUFAL ABDUL AZIZ JALALUDDIN  
NIM : 201810380211009**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Juli 2020**

**PENERAPAN *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA**

Diajukan oleh :

**MUH. NAUFAL ABDUL AZIZ JALALUDDIN**  
**201810380211009**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jum'at 14 Agustus 2020**

Pembimbing Utama

  
**Dr. Tongat, S.H., M.Hum**

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum**

  
Direktur  
Program Pascasarjana

  
**Prof. Akhsanul In'am, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
**Mokh. Najih, Ph.D**



# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUH. NAUFAL ABDUL AZIZ JALALUDDIN**  
**201810380211009**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, **Jum'at, 24 Juli 2020**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua** : **Dr. Tongat, S.H.,M.Hum**  
**Sekretaris** : **Dr. Surya Anoraga, S.H.,M.Hum**  
**Penguji I** : **Prof. Dr. Rahayu Hartini,**  
**S.H.,M.Si.,M.Hum**  
**Penguji II** : **Mokh. Najih, Ph.D**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Sholawat dan Salam kepada Amirul Mujahidin Rasulullah SAW, *uswatun hasanah* yang telah memberantas kebodohan di tengah ummat manusia. Setelah menempuh berbagai perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang akhirnya penyusun sampai pada tahap Penulisan Tugas Akhir ini yang menjadi syarat untuk penyusun bisa meraih gelar Magister Hukum. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, beserta jajarannya Wakil Rektor dan Bapak Mokh. Najih, P.hd., selaku Kaprodi MIH UMM;
2. Dosen Pembimbing Utama Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. dan Dosen Pembimbing Pendamping Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum yang selalu meluangkan waktu, sabar dalam membimbing penyusun serta memberikan penyusun motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat di dunia dan akhirat;
4. Kedua Orang tua, Ayah tercita Drs. Moh. Syafruddin M.Hum. dan Ibu tercinta Sholehah S.PdI. yang mengasihi, mencintai, dan memberikan dukungan serta doa kepada penyusun;
5. Istri tercinta Mardiana S.H., yang selalu memberikan dukungan dan doa serta bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi di MIH;
6. Kawan-kawan seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dan Semoga penelitian ini ada manfaatnya, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan kita di bidang hukum.

Penyusun



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
TINJAUAN PUSTAKA .....	5
1. Konsep Sistem Peradilan Pidana .....	5
2. Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	7
3. Tinjauan Umum Tentang Korporasi .....	11
4. Pengertian Dan Konsep DPA .....	12
METODE PENELITIAN .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Dan Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	18
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	18
1. KONSEP <i>DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT</i> (DPA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI AMERIKA SERIKAT .....	19
1.1. Korupsi oleh Korporasi di Amerika Serikat .....	19
1.2. Sejarah, Perkembangan dan Praktik DPA di Amerika Serikat .....	23
2. POTENSI PENERAPAN <i>DEFERRED PROSECUTION</i> <i>AGREEMENT</i> (DPA) DALAM REGULASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA .....	28
2.1 DPA dengan Subyek Hukum Korporasi .....	28
2.2. Konsep DPA dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	29
PENUTUP .....	34
1. Kesimpulan .....	34
2. Saran .....	35
Daftar Pustaka .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel Perbandingan KUHAP dan <i>Deferred Prosecution Agreement</i> .....	30
---	----

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUH. NAUFAL ABDUL AZIZ JALALUDDIN**

NIM : **201810380211009**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul : **PENERAPAN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, \_\_ Juli 2020



Yang menyatakan,

**MUH. NAUFAL ABDUL AZIZ JALALUDDIN**



# **PENERAPAN *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA**

MUH. NAUFAL ABDUL AZIZ JALALUDDIN

Nim : 201810380211009

Email : naufal.a.a.j@gmail.com

Dr. Tongat S.H., M.Hum.

NIDN : 0013016701

Dr. Surya Anoraga S.H., M.Hum.

NIDN : 0012076402

## **ABSTRAK**

Penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Namun, terdapat kesenjangan dalam tujuan terpenting penanggulangan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa tidak semudah yang dibayangkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Sehingga perlu adanya suatu paradigma baru sebagai upaya untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang kemudian akan dibahas dalam tesis ini dengan judul “Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia”. Dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah DPA dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu jalan yang ditempuh atau menjadi solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Bahwa di Amerika Serikat paling banyak terjadi adalah korupsi kerakusan dan penipuan (*fraud*) yang dilakukan korporasi. Komponen utama dari korupsi itu adalah penggelapan, pengaturan harga, perdagangan saham oleh orang dalam (*insider stock trading*), dan penilaian saham lebih tinggi (*stock over valuing*), dan sebagainya. Amerika Serikat telah memperkenalkan sistem DPA yang diterapkan masih terbatas pada kejahatan korporasi saja, yaitu kejahatan yang dianggap memakan tenaga, waktu dan biaya yang tinggi ditambah pembuktiannya yang sulit. Di Indonesia, korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan bertanggungjawab atas perbuatan korupsi, sehingga dapat dituntut sebagai pelaku. Sistem peradilan pidana Indonesia perlu memikirkan untuk mengadaptasi model DPA dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh korporasi. Pemikiran ini didasarkan kepada kesesuaian model ini dengan ketentuan dalam UNCAC.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Korporasi, *Deferred Prosecution Agreement*

# **IMPLEMENTATION OF DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) IN CRIMINAL CORRUPTION BY CORPORATIONS IN INDONESIA**

**MUH. NAUFAL ABDUL AZIZ JALALUDDIN**

Nim : 201810380211009

Email : naufal.a.a.j@gmail.com

**Dr. Tongat S.H.,M.Hum.**

NIDN : 0013016701

**Dr. Surya Anoraga S.H.,M.Hum.**

NIDN : 0012076402

## **ABSTRACT**

Corruption prevention is one of the agenda of law reform that has been implemented by the Indonesian Government. However, there is a gap in the most important objective of combating corruption crimes to restore the country's financial losses with the fact that the field is not as easy as imagined to return the country's financial losses. So there needs to be a new paradigm as an effort to maximize the return of state financial losses due to corruption crimes which will then be discussed in this thesis titled "Implementation of Deferred Prosecution Agreement (DPA) in Corruption act by corporations in Indonesia" The thesis aims to determine if the DPA is acceptable in the Indonesian legal system as one of the roads traveled or a solution in the completion of a corporate corruption act. The type of research used is normative, using statute approach, conceptual approach, and comparative approach. That in the United States the most happening is corruption and fraud (fraud) that corporations do. The main component of the corruption is the evasion, price setting, trading of stocks by insider, and higher stock valuation (stock over valuing), and so on. The United States has introduced a system of DPA which is applied is still limited to corporate crimes, namely crimes that are considered to consume energy, time and high costs plus a difficult evidence. In Indonesia, corporations can become perpetrators of corruption crimes and are responsible for corruption, so that they can be prosecuted as perpetrators. The Indonesian criminal justice system needs to consider adapting the DPA model in the country's refund of corruption by corporations. This thinking is based on the suitability of this model with provisions in UNCAC.

**Keyword:** Corruption crime, corporations, Deferred Prosecution Agreement

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan dan tindakan penguasa dalam negara hukum harus berdasar dan bersumber pada hukum yang benar dan adil serta mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan membawa kesejahteraan umum. Maka hukum yang demikian hanyalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>1</sup> Seiring perkembangan masyarakat tradisional (agraris) menuju masyarakat modern (industri), hukum mengalami pergeseran positif dalam peranan dan fungsinya yang tidak lagi hanya sebatas menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan berkembang untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bangsa (*welfare state*). Menyadari hal tersebut, maka memahami fungsi dan tujuan hukum sangat penting dalam menciptakan model pembangunan hukum yang akan diberlakukan dalam tata hukum Indonesia.<sup>2</sup> Agar tercapai dan terpenuhinya tujuan hukum, maka diperlukannya sistem hukum yang mendasar yaitu sistem peraturan dan sistem peradilan.

Suatu negara tidak dapat terlepas dari sistem hukum yang ada di dunia, yaitu sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law*. Sistem hukum *common law* didominasi oleh hukum tidak tertulis (asas *stare decisis*) melalui putusan hakim dan tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat. Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental/*civil law* didominasi oleh hukum tertulis (kodifikasi) dan ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat.<sup>3</sup> Indonesia sekarang ini tidak lagi menggunakan sistem hukum *civil law* secara absolut, melainkan sudah menggunakan *mix system* karena telah mengadopsi beberapa komponen sistem hukum *Anglo Saxon* kedalam sistem hukum Indonesia, baik dalam sistem peraturan maupun dalam sistem peradilan. Agar sistem peradilan berfungsi dengan baik maka dibutuhkan

---

<sup>1</sup> A. Mukthie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang. Bayumedia Publishing. Hlm. 74.

<sup>2</sup> Mokhammad Najih dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. Setara Press. Hlm. 20.

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman. 1977. *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall. Hlm. 125.

sebuah keutuhan sistem hukum, dimana sistem hukum tersebut bergantung pada kekuatan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat. Sehingga sistem hukum yang dianut oleh suatu negara akan senantiasa diikuti oleh sistem peradilannya.<sup>4</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem disebut dengan *criminal justice system* atau yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Mengutip definisi sistem peradilan pidana dari M. Faal yang menyatakan bahwa terdapat komponen-komponen dalam suatu sistem peradilan pidana yang saling bekerjasama satu sama lain untuk menanggulangi kejahatan, adapun komponen-komponen yang dimaksud adalah Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pendidik terpidana.<sup>5</sup> Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana yang penulis kutip dari Romli Atmasasmita, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan adanya keadilan, serta membuat efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak berniat untuk mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.<sup>6</sup> Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat serta mencegah dan menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda reformasi dibidang hukum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.<sup>7</sup> Bahwa dalam tindak pidana korupsi yang berdampak kepada kerugian keuangan negara<sup>8</sup> yang sangat besar, sudah pasti menghambat pembangunan nasional.

---

<sup>4</sup> Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hlm. 124.

<sup>5</sup> M. Faal. 2005. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm. 24.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 3.

<sup>7</sup> Febby Mutiara Nelson. 2020. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 1.

<sup>8</sup> Istilah kerugian keuangan negara dan kerugian negara digunakan secara berbeda pada beberapa peraturan perundangan-undangan, seperti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menggunakan nomenklatur "kerugian negara", Sedangkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang "keuangan negara". Dalam praktiknya, khususnya dalam audit keuangan negara, baik istilah "kerugian keuangan negara" maupun "kerugian negara" merujuk pada obyek yang sama. (Febby Mutiara Nelson. 2020. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.)

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk menekan angka korupsi, akan tetapi proses penanganan korupsi memerlukan waktu yang cukup lama dan justru malah menambah permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, baik itu melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu, belum juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang sampai saat ini belum menunjukkan penurunan angka yang positif.

Mengingat adanya kesenjangan dalam tujuan terpenting pada penanggulangan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa tidak semudah yang dibayangkan kembalinya kerugian keuangan negara tersebut (*das sein*). Sehingga dapat penulis simpulkan perlu adanya suatu paradigma baru sebagai bentuk usaha dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Bahwa dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang selama ini masih lemah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah *Deferred Prosecution Agreement* (selanjutnya disingkat DPA)<sup>9</sup> sebagai suatu ketentuan dan penyelesaian tindak pidana korupsi yang telah berkembang di negara-negara dari keluarga hukum *common law* pada umumnya dan kemudian juga di sebagian negara *civil law* dapat diterapkan sebagai bentuk penyelesaian perkara korupsi di Indonesia.

Secara ringkas DPA merupakan mekanisme penyelesaian permasalahan dalam tindak pidana yang dilakukan (khususnya) oleh korporasi. DPA ini dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan bersalah dari terdakwa. Penerapan DPA juga sangat berkaitan dengan kedudukan dan wewenang Jaksa. Bahwa dalam hal ini terdakwa (korporasi) dengan penuntut umum melakukan negosiasi yang

---

<sup>9</sup> *Deferred Prosecution Agreement*, merupakan model penyelesaian tindak pidana yang dilakukan sebelum proses adjudikasi dilakukan di Pengadilan, subyek dari *deferred prosecution agreement* di Inggris dan beberapa negara lainnya selain Amerika Serikat, hanya korporasi. Sementara di Amerika Serikat individu juga bisa menjadi subyek dari *deferred prosecution agreement*. (Febby Mutiara Nelson. 2020. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.)



membahas tentang kebijakan penuntut umum untuk menghentikan perkara yang diduga dilakukan oleh korporasi, jika hakim sudah menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh jaksa (*prosecutor*) dengan terdakwa atau penasehat hukumnya. Adapun hal-hal yang disepakati antara lain berupa membayar ganti rugi keuangan negara, melakukan pemulihan keadaan dan pencegahan kegiatan yang serupa dikemudian hari.<sup>10</sup> Adanya kesepakatan ini mungkin dapat menjadi solusi yang baik dalam penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana korupsi yang dalam hal ini subyek hukumnya adalah korporasi. Dengan demikian, menarik diteliti apakah DPA ini dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu jalan yang di tempuh atau menjadi solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Mengingat bahwa paradigma yang selama ini berjalan yakni negara berhadapan dengan para pelaku kejahatan yang harus disidik, kemudian dituntut dan dijatuhi hukuman, dimana tersangka/terdakwa diperlakukan sebagai subyek yang tidak dapat diajak berkomunikasi melalui proses negosiasi yang menguntungkan kedua pihak. Bahwa dalam hukum pidana Indonesia, proses negosiasi dalam penyelesaian perkara pidana dianggap asing, sementara di sebagian negara lainnya seperti Amerika Serikat sudah lama menerapkan model seperti DPA sebagai jalan keluar atau solusi dalam penyelesaian perkara yang lebih cepat dan menguntungkan negara. Bahwa model DPA dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia ini merupakan suatu model yang masih baru, asing dan belum dikembangkan. Maka penulis tertarik untuk membahas apakah model DPA ini dapat diterapkan di Indonesia sebagai negara yang dipandang masuk dalam tradisi hukum *civil law* dikaitkan dengan konteks lemahnya kemampuan sistem peradilan pidana kita dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana korupsi yang dalam penelitian ini melibatkan korporasi sebagai tersangka/terdakwa dan pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkannya.

---

<sup>10</sup> <https://www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-protocols/deferred-prosecution-agreements/>, diakses pada 21 Februari 2020.

## 2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal terpenting agar penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sehingga sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis. Adapun perumusan masalah yang hendak penulis kaji sebagaimana latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Amerika Serikat?
2. Bagaimana potensi penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam regulasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesia?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat akibat ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum, yang terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu digunakannya pendekatan hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dalam penegakan hukum yang dikenal dengan istilah *law enforcement*, yang menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan mengedepankan kepolisian sebagai pendukung utama sehingga bergantung pada efektifitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.<sup>11</sup>

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan ini terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang kemudian diberi nama *Criminal Justice System* dan diperkenalkan secara luas oleh *The President's Crime Commission*. Kurun waktu akhir tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 1970-an, *Criminal Justice System* sebagai disiplin ilmu tersendiri yang muncul menggantikan *law enforcement* atau

---

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung. Widya Padjadjaran. Hlm. 33.

*police studies*. Perkembangan ilmu ini baik di Amerika dan di beberapa negara Eropa menjadi suatu model yang dominan dengan menitikberatkan pada administrasi peradilan serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.<sup>12</sup>

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia pada saat ini, merupakan terjemahan dan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System* yang telah dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat, sebagaimana yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary*.<sup>13</sup>

*"Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)".*

"Sistem Peradilan Pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen: penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas pembinaan)".

Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita adalah suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>14</sup> Pendapat Romli Atmasasmita ini sependapat dengan Remington dan Ohlin yang mengemukakan sebagai berikut:

*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>15</sup>

Hagan membedakan antara *criminal justice system* dengan *criminal justice process*. Menurut *criminal justice system* adalah suatu bentuk interkoneksi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji. 2005. *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan". Hlm. 4.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bandung. Putra Abardin. Hlm. 14.

<sup>15</sup> *Ibid.*

antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *criminal justice process* adalah setiap langkah atau tahapan dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.<sup>16</sup> Sehingga dalam hal ini sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *The network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Pemahaman tentang sistem harus dilihat dalam konteks baik sebagai sistem fisik dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai sistem abstrak dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur dimana satu dan lainnya berada dalam ketergantungan.<sup>17</sup>

## 2. Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, disebutkan pula bahwa *corruption* berasal dari bahasa latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Kemudian dari bahasa latin itulah kebanyakan menurun dalam bahasa Eropa, seperti Inggris *corruption* dan *corrupt*, Perancis *corruptio*, dan Belanda *corruption* (*korruptie*), yang kemudian dalam bahasa Belanda ini yang diyakini menurun ke bahasa Indonesia “korupsi”.<sup>18</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Mengutip pendapat dari David M. Chalmers, Baharuddin Lopa menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal tersebut diambil dari definisi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*”.<sup>19</sup>

Jeremy Pope berpendapat bahwa korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Dapat pula dikatakan sebagai suatu perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, maksudnya yaitu dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi apakah dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Op.cit. Hlm. 2.

<sup>17</sup> Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 15.

<sup>18</sup> Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. Rajawali Press. Hlm. 7.

<sup>19</sup> 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hlm. 12.

perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Apabila prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, maka korupsi akan timbul. Sebagai contoh, adanya konflik kepentingan dan nepotisme, sehingga prinsip mempertahankan jarak ini merupakan landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai efisiensi.<sup>20</sup>

Menurut Jeremy Pope, cara-cara yang digunakan dalam melakukan korupsi diantaranya, yaitu:

- a. Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga, dan sanak keluarga;
- b. Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya;
- c. Uang komisi bagi kontrak pemerintah (dan subkontrak jasa konsultan);
- d. Berbagai ragam penggelapan.<sup>21</sup>

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR) korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari rumusan tersebut dapat diperoleh bahwa suatu kasus dapat dikatakan sebagai kasus tindak pidana korupsi apabila telah memenuhi unsur, yaitu:

- a. Pelaku memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.
- b. Perbuatan tersebut berakibat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum pada saat ini, pelaku tindak pidana korupsi banyak melibatkan jajaran direksi atau pegawai perusahaan, baik itu perusahaan negara yang berupa BUMN dan BUMD

---

<sup>20</sup> Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 30.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 32.



maupun perusahaan swasta terkait.<sup>22</sup> Disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU TIPIKOR, yaitu:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik itu badan hukum maupun bukan badan hukum;
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
  - 1) Pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian;
  - 2) Pegawai negeri yang dimaksud dalam KUHP;
  - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan dari negara atau daerah;
  - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>23</sup>

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>24</sup>

Pada tindak pidana korupsi “suap” tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan negara. Dengan suatu kesepakatan atau deal dari seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat. Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari

---

<sup>22</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta. Kencana. Hlm. 64.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ermansyah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 63.

uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.<sup>25</sup>

Akan tetapi tindak pidana korupsi “suap” sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan” karena dalam hal tindak pidana korupsi “pemerasan” seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta secara langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” Karena jika “gratifikasi” seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang ataupun benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi “suap”.

Adapun jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi dalam UU TIPIKOR dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi murni, yang dalam perumusannya memuat norma dan sanksi sekaligus;
2. Tindak pidana korupsi tidak murni, dalam perumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya terdapat dalam KUHP.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa subjek delik korupsi terbagi dalam dua kelompok, kedua-keduanya jika melakukan perbuatan pidana akan diancam sanksi. Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah Manusia, Korporasi, Pegawai Negeri, dan Setiap orang.

Berdasarkan ketentuan UU TIPIKOR, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara dan Denda;
3. Pidana Tambahan;
4. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya;
5. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 67.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Kata korporasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *corporatio*, yang dalam bahasa Belanda *corporatie*, dalam bahasa Inggris *corporation*, dan dalam bahasa Jerman *corporation*. Sebagai kata benda (*substantivum*) kata *corporatio* berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. Kata *corpus* (dalam bahasa Indonesia memiliki arti badan) merupakan asal kata dari *corporare* yang kemudian memiliki arti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* bermakna hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain suatu badan yang dijadikan orang, suatu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>26</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum, badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan hasil ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>27</sup>

Mengenai definisi korporasi, Utrecht/Moh. Soleh Djindang memberikan definisi bahwa korporasi ialah:

“Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing”.<sup>28</sup>

Sebagaimana yang telah dihimpun oleh A. Abdurachman tentang pengertian korporasi dalam *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan* adalah:

*Corporatio* (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau

---

<sup>26</sup> Muladi, Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana. Hlm. 23.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 24.

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 25.

untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, partikelir.<sup>29</sup>

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2012 Pasal 182 yang berbunyi, “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Pengertian ini mirip dengan pengertian korporasi di Belanda, sebagaimana yang terdapat dalam bukunya Van Bemmelen yang berjudul *Ons Strafrecht I Het Materiele Strafrecht Algemeen deel* antara lain menyatakan, “...Dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum ‘korporasi’, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum (maksudnya badan hukum privat dan badan hukum publik---penulis), perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah”.<sup>30</sup>

#### 4. Pengertian Dan Konsep DPA

Sebuah konsep baru yang telah berkembang di Amerika Serikat yang kemudian disebut dengan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di negara tersebut. DPA adalah sebuah bentuk negosiasi yang dilakukan antara jaksa dengan terdakwa atau kuasa hukumnya (Advokat) dimana terdakwa ialah korporasi, yang bertujuan untuk melakukan pengalihan penuntutan dari proses peradilan ataupun menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil.<sup>31</sup> Sebagai suatu upaya dalam mengalihkan penuntutan korporasi dari proses peradilan atau suatu bentuk penanganan kesalahan korporasi yakni melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil,

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 26.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 32.

<sup>31</sup> Polly. Sprenger. 2011. *Deferred Prosecution Agreement: The Law And Practice Of Negotiated Corporate Criminal Penalties*. London: Thomson Reuters. CPT Group. Hlm. 1.

telah tersedia berbagai bentuk perjanjian bagi penuntut umum dan korporasi atau penasehat hukumnya.<sup>32</sup>

Konsep ini seolah mirip dengan *plea bargaining*, dimana jaksa penuntut umum melakukan negosiasi dengan terdakwa atau penasehat hukumnya sebelum proses pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ke pengadilan. *Plea bargaining* sendiri sudah berkembang cukup lama di negara-negara *common law*, dan *plea bargaining* dianggap efisien mengurangi penumpukan perkara. Di Amerika Serikat sekitar 95 persen perkara diselesaikan melalui prosedur *plea bargaining*. Akan tetapi mekanisme ini tetaplah menjadi perdebatan dalam dunia akademis maupun penegakan hukum.<sup>33</sup> Belajar dari keberhasilan yang dicapai dengan menggunakan mekanisme *plea bargaining* tersebut, maka DPA juga diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi dan agar dalam penanganan perkara korporasi dapat menjadi lebih efisien dan masyarakat dapat pula menerima manfaat dari hukuman yang di sepakati dari kasus korporasi tersebut.<sup>34</sup>

Pada pelaksanaannya DPA dapat ditawarkan oleh jaksa atau regulator ketika perusahaan menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses penyidikan pidana, pengakuan fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan lainnya seperti hukuman, reparasi, denda, dan biasanya tindakan preventif agar tidak mengulangi kembali. Ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban hukum seperti:

- 1) Pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Pembayaran denda dan kompensasi;
- 3) Penunjukan auditor independen untuk mengawasi kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu;
- 4) Pemecatan pegawai tertentu; dan
- 5) Pelaksanaan program pemenuhan.<sup>35</sup>

Kejahatan korporasi ini memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian, dan bahkan dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara, sehingga kejahatan korporasi dianggap sebagai permasalahan yang serius. Oleh karena proses investigasi, penuntutan dan peradilannya memakan biaya yang besar, serta lambat

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 77.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 1.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 1.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 8-11.



dan kompleks, maka diperlukannya suatu inovasi yang menyediakan alternatif pilihan yang lebih cepat, efektif, proporsional dan kepastian hukum yang tinggi dalam pemidanaan korporasi. Inovasi yang kemudian dimaksudkan tersebut adalah DPA yang telah berkembang di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.<sup>36</sup>

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa DPA memiliki dimensi kontrak, yaitu perjanjian antara entitas/korporasi atau individu dengan negara. Korporasi dan individu mengakui telah terjadi tindak pidana, berjanji tidak akan mengulangi, mengambil langkah pencegahan dan memperbaiki kerugian yang sudah terjadi. Konsep ini sebenarnya sudah ada pada manusia pribadi kodrati pada DPA di Amerika Serikat, dan baru pada tahun 2003 diperkenalkan DPA untuk korporasi di Inggris.<sup>37</sup>

Selama ini penuntutan korporasi kebanyakan memberdayakan *whistle-blower* atau *self-reporting*. Hal ini tidak menarik bagi korporasi karena *self reporting* tidak menutup kemungkinan korporasi tetap akan dituntut dan hukuman yang dijatuhkan tidak akan lebih ringan, apalagi untuk taraf kejahatan ekonomi.<sup>38</sup> Mekanisme DPA dianggap menguntungkan bagi korporasi, karena dengan menghindari proses peradilan, potensi terhadap jatuhnya harga saham dapat dihindari, reputasi perusahaan tetap terjaga, dan perusahaan terhindar dari resiko bangkrut atau tutupnya perusahaan. Mekanisme DPA juga diharapkan mampu meminimalisir resiko pengulangan tindak pidana oleh korporasi (pencegahan).<sup>39</sup>

DPA dilakukan secara sukarela antara jaksa dan korporasi atau individu berdasarkan *self-reporting* dari pelaku atau temuan dari jaksa atas kejahatan. Khusus untuk korporasi, mekanisme DPA selalu menyaratkan program *compliance* (kepatuhan) bagi korporasi. Mekanisme DPA ini juga dilakukan berdasarkan hak diskresi jaksa. DPA memiliki sejumlah keuntungan, yakni:

- 1) Mendorong *self-reporting* oleh korporasi dengan cara: menghindari tuntutan formal yang mungkin merusak reputasi korporasi, memberikan kepastian hasil DPA sehingga korporasi tetap dapat

---

<sup>36</sup> Michael Bisgrove dan Mark Weekes. 2014. *Deferred Prosecution Agreement: a Practical Consideration. Criminal Law Review*. Hlm. 1.

<sup>37</sup> Constatino Grasso. *Peaks And Troughs Of The U.K. Deferred Prosecution Agreement*. Hlm. 11.

<sup>38</sup> Michael Bisgrove dan Mark Weekes. *Op. cit.* Hlm. 2.

<sup>39</sup> Constatino Grasso. *Op. cit.* Hlm. 11-12.

- beraktifitas dalam bisnisnya, menghindari biaya yang besar akibat penuntutan, memungkinkan pengurangan sanksi finansial apabila korporasi pelaku bersikap kooperatif;
- 2) Memperkuat investigasi dan penuntutan: sehingga kendala penyidikan dan penyelidikan yang selama ini dihadapi dapat dicegah;
  - 3) Meningkatkan hasil: sejumlah korporasi yang mungkin tidak terdeteksi oleh penegak hukum, terutama jaksa;
  - 4) Meningkatkan ketaatan dan budaya korporasi; dan
  - 5) Mencegah dampak bagi pihak ketiga: seperti pengangguran, kehilangan investor, dan kerusakan struktur pasar.<sup>40</sup>

DPA mungkin dirasa tidak adil, karena dibenarkan menghindari pengadilan dengan membayar sejumlah uang, namun korporasi berbeda dengan manusia. Korporasi tidak memiliki akal dan moral sehingga perlu pendekatan yang sesuai pula untuknya. Tantangan praktisnya adalah mungkin membuat korporasi bersikap kooperatif dan Jaksa Penuntut Umum mampu memposisikan dirinya sebagai Penuntut umum dalam bernegosiasi.<sup>41</sup> Namun demikian mekanisme DPA mempunyai beberapa catatan kritis terhadap penggunaannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini merujuk pada “penelitian kepustakaan” guna menentukan serangkaian norma atau aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrinisasi hukum untuk menjawab berbagai isu hukum yang akan dihadapi. Bahwa dalam tesis ini, menggunakan penelitian yuridis normatif hukum karena merupakan sebuah objek yang sangat signifikan untuk dikaji, sehingga penelitian ini akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada serta penelitian ini tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum.

---

<sup>40</sup> Public Consultation Paper, Australian Government/Attorney-General Departement. Maret 2016. *Improving Enforcement Options for Serious Corporate Crime: Consideration of a Deffered Prosecution Agreements Scheme in Australia*. Hlm. 10.

<sup>41</sup> Michael Bisgrove dan Mark Weekes. *Op. cit.* Hlm. 2.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bagian dari sebuah sistem norma, sehingga dalam penelitian ini juga dapat menggunakan asas-asas, norma-norma, serta kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan sebagai penguat alasan dan data penulis. Kemudian dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan secara konsep atas suatu permasalahan yang belum terdapat aturan hukumnya.<sup>42</sup> Mempelajari dari berbagai pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dalam penelitian tesis ini. Selain itu dalam penelitian tesis ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu melakukan studi perbandingan hukum untuk membandingkan hukum dalam suatu negara dengan hukum negara lain. Dalam perbandingan hukum ini, dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat ekonomi, namun hanya melihat pada substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal.<sup>43</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian tesis ini akan melakukan perbandingan hukum dengan melakukan perbandingan antara *Federal Rules of Criminal Procedure* Amerika Serikat tentang *Deferred Prosecution Agreement* di Amerika Serikat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia.

## 3. Sumber dan Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian tesis ini berpatokan pada data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber aslinya, melainkan didapatkan dari bahan-bahan atau yang bersumber pada kepustakaan. Bahwa dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Grup. Hlm. 9.

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm. 177.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan *Federal Rules of Criminal Procedure* Amerika Serikat, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan penelitian tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>44</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penerapan *deferred prosecution agreement* (DPA) dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm. 35.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif isi (*content analysis*) dengan menelaah konsep dari *deferred prosecution agreement* (DPA) di Amerika Serikat yang kemudian dianalisa untuk menemukan urgensi dari suatu konsep tersebut, setelah menemukan urgensi dari konsep tersebut kemudian disesuaikan dan dirumuskan dalam bentuk konsep yang akan diterapkan di Indonesia. Sehingga nantinya penulis akan menemukan urgensi dari DPA saat diterapkan di Indonesia. Bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif isi (*content analysis*) akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara bahan hukum yang digunakan. Selanjutnya semua bahan hukum tersebut akan diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif untuk mencari kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus dari suatu konsep tersebut, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari pemecahan terhadap permasalahan yang dimaksud.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah Indonesia, namun dalam penanggulangannya masih menyisakan banyak masalah, terutama dalam hal rendahnya pengembalian kerugian keuangan negara. Upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia selama ini telah dilakukan di Indonesia dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, baik itu melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu, namun belum juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Sehingga dapat penulis simpulkan perlu adanya suatu paradigma baru sebagai upaya untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, yang kemudian akan penulis sampaikan dalam pembahasan berikut.



## **1. KONSEP *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI AMERIKA SERIKAT**

### **1.1. Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi di Amerika Serikat**

Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat serta menyebabkan kemiskinan di negara-negara berkembang. Sebagai contoh, 180 juta dollar AS telah dibayarkan oleh Halliburton Corporation kepada pejabat-pejabat di Nigeria sebagai uang suap. Jika dikonversi menjadi mata uang lokal angka sebesar itu akan sama dengan alokasi pajak setahun untuk banyak negara bagian di negara tersebut.<sup>45</sup> Nilai dari angka tersebut sangat besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar dari jutaan warga Nigeria. Bagi perusahaan Halliburton, angka sebesar itu dianggap sebagai biaya modal untuk berbisnis di Nigeria. Itu merupakan contoh bagaimana perusahaan negara maju di Amerika Serikat melakukan bisnisnya di negara berkembang.<sup>46</sup>

Saat ini perilaku korup sudah menjadi suatu fenomena global. Bahwa akibat dari tindak pidana korupsi jauh lebih berat pada negara-negara miskin dibanding negara-negara kaya dan tentunya sangat berdampak bagi orang-orang miskin daripada para elit yang memiliki keistimewaan. Sebagai contoh di Amerika Serikat, korupsi juga menyebar sebagaimana di Nigeria dan Bangladesh, dengan perbedaan bahwa lebih besar kapasitas ekonomi Amerika Serikat untuk menyerap biaya korupsi dan juga efisiensi sistem peradilan pidana Amerika Serikat dalam memerangi korupsi. Di Amerika Serikat yang paling banyak terjadi adalah korupsi kerakusan dan penipuan (*fraud*) yang dilakukan korporasi. Komponen utama dari korupsi itu adalah penggelapan, pengaturan harga, perdagangan saham oleh orang

---

<sup>45</sup> Timothy A. Falade Obalade, "Analysis of Corporate Corruption in the USA: A Descriptive Overview of Recent History," *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 4 No. 5; March 2014, hal. 251-259.

<sup>46</sup> *Ibid.*

dalam (*insider stock trading*), dan penilaian saham lebih tinggi (*stock over valuing*), dan sebagainya.<sup>47</sup>

Pada dewasa ini, beberapa kasus korupsi oleh perusahaan di Amerika Serikat mendapat perhatian dunia internasional dengan adanya penyidikan terpisah oleh negara-negara multinasional pada beberapa kasus. Sebagai contoh dari sebagian kasus-kasus yang melibatkan perusahaan multinasional tersebut termasuk di dalamnya, *The Energy Grand Company, Enron Corp, The Communications Giant MCI - World com* dan lainnya termasuk *Halliburton, Arthur Anderson, Adolphia, Global Crossing, Dynergy Tyco, Quest, Inclone, Xerox, dan Martha Stewart's Omni Media Corp.*<sup>48</sup>

*Corporate Crime* dimaknai dalam *Black's Law Dictionary* sebagai berikut:<sup>49</sup>

*"a crime committed by a corporation's representatives acting on its behalf. Although a corporation as an entity cannot commit a crime other than through its representatives, it can be named as a criminal defendant."*

Artinya: "Suatu kejahatan yang dilakukan oleh wakil korporasi yang bertindak atas nama korporasi. Meskipun korporasi sebagai suatu entitas tidak bisa melakukan suatu kejahatan di luar perwakilannya, ia tetap dapat diajukan sebagai Terdakwa."

Agar sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, banyak pengadilan di Amerika Serikat mensyaratkan setidaknya ada tiga syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap korporasi, yaitu:<sup>50</sup>

1. *The corporation agent must have the authority to act for the corporation and be acting within the scope of his or her business responsibilities;*<sup>51</sup>
2. *The agent must act, at least in part, to further the corporation's business interest;*<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary, Ninth Edition*, (USA: West Publishing Co., 2009), hal. 341.

<sup>50</sup> J. David Reitzel, et. al., *Contemporary Business Law and The Legal Enviroment: Principles and Cases* (New York: McGraw-Hill, Inc., 1994), hal.193.

<sup>51</sup> Agen korporasi haruslah memiliki kewenangan untuk bertindak bagi korporasi dan bertindak dalam batasan tanggung jawabnya.

3. *The criminal act must be authorized, tolerated or ratified (accepted after the fact) by corporate management.*<sup>53</sup>

Artinya:

1. Agen korporasi harus memiliki wewenang untuk bertindak untuk korporasi dan bertindak dalam lingkup tanggung jawab bisnisnya;
2. Agen harus bertindak, setidaknya sebagian, untuk memajukan kepentingan bisnis perusahaan;
3. Tindak pidana harus disetujui, ditoleransi atau diratifikasi (diterima setelah terjadi) oleh manajemen perusahaan.

*The US Model Penal Code, section 2.01*, mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:<sup>54</sup>

*The Model Penal Code, section 2.01, remedies some of the problem of the respondeat superior standard because it more narrowly imposes corporate criminal liability. The code approach more closely tracks the approach taken worldwide for imposing corporate criminal liability only for the acts of some corporate agents. It provides that a corporation is criminally liable for criminal conduct that was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment. A high managerial agent is anyone having duties of such responsibility that (their) conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association.*

Artinya: Model Penal Code, seksi 2.01, menyelesaikan beberapa masalah standar respondeat superior karena secara sempit mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Pendekatan dari Code ini lebih dekat menuju pendekatan yang diambil di seluruh dunia untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana hanya bagi tindakan oleh beberapa agen korporasi. Code ini menyatakan bahwa suatu korporasi secara pidana bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang diberikan ijin, diminta, diperintahkan, ditunjukkan atau ditoleransi karena kealpaan oleh dewan direksi atau oleh agen manajemen tingkat tinggi yang bertindak atas nama korporasi dalam cakupan tugas kantornya atau pekerjaannya. Agen manajemen tingkatan tinggi tersebut adalah setiap orang yang memiliki tugas atau tanggung jawab bahwa tindakan mereka bisa secara fair diasumsikan mewakili kebijakan korporasi atau asosiasi itu.

---

<sup>52</sup> Agen korporasi harus bertindak, setidaknya sebagian, untuk meningkatkan kepentingan bisnis korporasi.

<sup>53</sup> Tindak pidana haruslah diijinkan, diberi toleransi atau diratifikasi (diterima setelah itu terjadi) oleh manajemen korporasi.

<sup>54</sup> United State Model Penal Code, Section 2.01.

Pertanggungjawaban pidana korporasi mulai berdampak kepada penegakkan hukum korporasi di Amerika Serikat setelah adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *The New York Central & Hudson River Railroad Co. Vs United States* 212 US 481 tahun 1909. Putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana pengganti terhadap *The Newyork Central dan Hudson River Rairoad co.* Kemudian putusan ini diikuti oleh putusan-putusan pengadilan selanjutnya.<sup>55</sup> Putusan ini memuat pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang mengandung unsur kesalahan (*vicarious liability*): “*With the conduct of officers, agents, or even employees acting for the company was deemed an act of the corporation itself and the criminal intent of natural persons imputed to the juristic person.*”<sup>56</sup>

Di Amerika Serikat, doktrin *respondeat superior*, umumnya digunakan untuk konsep kesalahan dalam teori pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*). Hal ini digunakan untuk penuntutan pidana korporasi. Jaksa harus membuktikan standar tindak pidana yang dilakukan oleh agen, pegawai, direktur, atau pemegang saham yang berada dalam wilayah tugasnya, dengan niat paling tidak sebagian untuk menguntungkan perusahaan.<sup>57</sup> Melalui ajaran *vicarious liability*, suatu korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang masuk kategori tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya, sepanjang perbuatan yang dilakukan pegawainya tersebut masih dalam kewenangan pegawai tersebut, baik yang berkedudukan tinggi maupun tidak, baik yang melanggar kebijakan korporasinya tempat dia bekerja maupun tidak selama perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasinya. Sebelumnya subjek pelaku

---

<sup>55</sup> William A. Somplson, “Corporate Criminal Intent,” <http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm/-abstract-id=1444543>, hal.5, diakses 16 April 2020.

<sup>56</sup> Dengan perbuatan dari pejabat, agen atau bahkan pegawai yang bertindak untuk perusahaan dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri dan niat jahat dari manusia kodrati didakwakan kepada person hukum. Markus Wagner, “Corporate Criminal Liability : National And International Responses,” <http://www.icclr.Law.ubc.ca/Publication/Reports/CorporateCriminal.pdf>, hal. 3, diakses 15 Maret 2020.

<sup>57</sup> Polly Sprenger, *Deferred Prosecution Agreements*, hal. 3-5.

tindak pidana korporasi tersebut, haruslah orang yang mempunyai kewenangan dan perbuatannya memberikan keuntungan bagi korporasi.<sup>58</sup>

## 1.2. Penerapan DPA di Amerika Serikat

Amerika Serikat telah memperkenalkan sistem DPA yang diterapkan masih terbatas pada kejahatan korporasi saja, yang muncul sebagai alternatif dalam menanggulangi kejahatan korporasi sehingga tidak perlu masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana. Dengan bahasa lain, DPA merupakan filter perkara yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana dengan mengakomodir itikad baik dari korporasi itu pula. Mekanisme ini dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuat perjanjian dengan perusahaan (korporasi) yang melakukan kejahatan di bidang ekonomi (*white collar crime*). Dengan kesepakatan untuk memenuhi kewajiban yang ada di dalam perjanjian, jaksa kemudian membekukan penuntutan sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap adjudikasi.

Di Amerika Serikat, DPA terus mengalami perkembangan (*gradual process*) sehingga saat itu menurut konsepnya hanya diterapkan terhadap korporasi. DPA yang dikenal sekarang berpangkal pada kasus *Salomon Brothers* tahun 1992. Sedangkan pada tahun 1975 DPA hanyalah sarana bagi hakim, bukan penuntut umum (*prosecutors*).<sup>59</sup> Mekanisme DPA mengemuka di Amerika Serikat pasca *Enron Scandal*<sup>60</sup> yang juga menjerat auditor Arthur Anderson. Contoh penerapan DPA (tergabung dengan

---

<sup>58</sup> Jennifer Arlen, "Evolution of Corporate Criminal Liability: Implication for managers," [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=591202](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=591202), hal. 4 diakses pada tanggal 16 April 2020.

<sup>59</sup> Sharon Oded, "Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance In Times Of Economic Meltdown," *The Journal fo Social Justice*, Vol.2 (2011), hal. 69-70.

<sup>60</sup> Kasus Enron yang meminta pertanggungjawaban sampai kepada *low level employee* serta denda yang sanksi yang cukup besar-besaran mengakibatkan lahirnya Thompson Memorandum Principles pada tahun 2003. Isinya merupakan bentuk edukasi bagi penegak hukum, terutama penuntut umum dalam memidana korporasi misalnya dengan mempertimbangkan *critical mitigating factors* seperti misalnya *cooperation, collateral damage, and alternative remedies*. Selain itu penegak hukum, terutama penuntut umum juga perlu mempertimbangkan korporasi yang perbuatannya dapat mengakibatkan "... *immense harm, and whose prosecution can result in enormous benefits, not only in restitution to victims, but in being a catalyst for tremendous changes for the good in many industries*". Lihat Christopher A. Wray dan Robert K. Hur, "Corporate Criminal Prosecution in a Post-Enron World: the Thompson Memo In Theory And Practice", *American Criminal Law Review*, Vol.43 (2006), hal. 1096.



NPA) lainnya di Amerika Serikat sudah banyak dilakukan, yakni pada tahun 2008 sebanyak 11 perjanjian, pada 2009 sebanyak 32 perjanjian, pada 2010 sebanyak 31 perjanjian, dan pada tahun 2015 dilakukan sebanyak 100 perjanjian.<sup>61</sup> Kondisi peningkatan jumlah inilah yang kemudian menyebabkan para ahli hukum pidana ingin meninjau ulang penggunaan DPA, apakah peningkatan jumlah perjanjian merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan korporasi atau sebaliknya malah merupakan kegagalan untuk mencegah korporasi melakukan kejahatan.

DPA dilakukan berdasarkan diskresi jaksa dan dilakukan sebelum *trial*. Hal yang menjadi pertimbangan jaksa adalah dampak terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah bila tuntutan pidana dilakukan, adanya restitusi bagi korban dan adanya program *compliance*.<sup>62</sup> DPA bersifat sukarela. Pengakuan korporasi bisa dijadikan sebagai alat bukti oleh jaksa pada sidang (jika DPA gagal). DPA dilakukan di bawah pengawasan yudisial yang terbatas. DPA diajukan ke pengadilan dan hakim diminta untuk menerima DPA, bukan mengadili *judicial hearing* kasus per kasus. Begitu DPA disetujui pengadilan, tidak ada kewajiban mempublikasikan perjanjian tetapi biasanya sudah bisa diakses publik. DPA yang diinisiasi oleh SEC harus dipublikasi di website SEC. Untuk mengawasi penerapan program *compliance*, pengawasan dilakukan oleh pengawas independen yang biayanya dibebankan kepada korporasi pelaku. Jika korporasi tidak menjalankan kewajiban yang termaktub dalam DPA, jaksa dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan formal. DPA di Amerika Serikat dapat dilakukan terhadap korporasi maupun individu dan dapat dilakukan terhadap banyak jenis kejahatan. Jaksa Penuntut Umum memiliki diskresi yang luas terkait delik yang bisa dinegosiasikan. Terdapat daftar delik

---

<sup>61</sup> Gibson Dunn, "2010 Year-End Update on Corporate Deferred Prosecution And on rosecution Agreements," 4 Januari 2011, <http://www.gibsondunn.com/publications/Documents-/2010Year-End-Update-CorporateDeferredProsecutionAndNon-ProsecutionAgreements.pdf>, diakses pada 17 Februari 2020.

<sup>62</sup> Public Consultation Paper, Australian Government/Attorney-General Departement, Maret 2016, *Improving Enforcement Options for Serious Corporate Crime: Consideration of a Deffered Prosecution Agreements Scheme in Australia*, hal. 11.



yang tidak dapat di-DPA termasuk keamanan negara, urusan luar negeri, dua atau lebih kejahatan berat yang dilakukan individu, atau pejabat negara yang melanggar urusan/kepercayaan publik.<sup>63</sup>

Di Amerika Serikat, DPA dapat diterapkan apabila ada: “....*an admission of facts* (mengakui fakta), *an agreement of cooperation* (setuju untuk bekerjasama), *a specified duration for the agreement* (jangka waktu tertentu dari persetujuan itu), *and an agreement to monetary an non-monetary anctions* (persetujuan atas pembayaran berupa yang atau non-uang)”. Adapun sanksi yang paling lazim diterapkan adalah *restitution* (restitusi), *fines* (denda), *probation* (hukuman percobaan), *appointment of monitors* (penunjukan pengawas), *and termination of responsibile individu* (pemberhentian individu yang bertanggungjawab).<sup>64</sup>

Berdasarkan Memorandum Thomson (US), kriteria untuk jaksa menggunakan DPA berbeda dengan kriteria jaksa dalam melakukan penuntutan biasa, berikut adalah kriteria bagi jaksa untuk melakukan penuntutan dengan menggunakan DPA:<sup>65</sup>

- 1) Sifat dan keseriusan dari pelanggaran.
- 2) Kedalaman pelanggaran dalam perusahaan dan partisipasi dari manajemen senior.
- 3) Riwayat pelanggaran tindak pidana, perdata, dan pelaksanaan regulasi.
- 4) “ketepatan waktu dan kesukarelaan” perusahaan dan itikad untuk kooperatif dalam proses investigasi.
- 5) Kehadiran dan kecukupan kepatuhan internal dan sistem tata kelola perusahaan, beserta perkembangan dari program tersebut.
- 6) Tindakan manajemen untuk mendisiplinkan dan mengurangi pelanggaran, membayar restitusi, dan kooperatif dengan agen pemerintah.
- 7) Konsekuensi jaminan seperti kerugian yang tidak proporsional bagi pemegang saham, pensiunan, dan pegawai yang tidak terbukti kesalahannya.
- 8) Apakah penuntutan terhadap individu yang bertanggungjawab atas pelanggaran ataupun pelaksanaan regulasi lainnya akan memberikan pemulihan yang cukup.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hal. 12.

<sup>64</sup> Cindy R. Alexander dan Mark A. Cohen, *Non-Prosecution, Deffered Prosecution, and Plea Agreements in the Settlement of Alleged Corporate Criminal Wrongdoing*, hal. 2.

<sup>65</sup> Polly Sprenger, *Deferred Prosecution Agreements*, hal. 13.

*Thomson memorandum* ini kemudian menjadi dasar dari amandemen *the US Principles of Federal Prosecution of Bussiness Organisation*. Tujuannya adalah jelas, yakni untuk memberikan penghargaan bagi sikap kooperatif dan kemandirian perusahaan melalui opsi lunak seperti DPA atau NPA. Pada DPA, korporasi dapat dihentikan penuntutannya oleh jaksa sepanjang korporasi itu mematuhi sejumlah *compliance* (kepatuhan) yang disepakati bersama. *Compliance* itu sendiri akan terus diawasi. *Deferred Prosecution Agreement* sendiri menuai sejumlah kontroversi perusahaan yang membayar firma JPU John Ashcroft hingga \$52 juta sebagai monitor independen untuk menghindari penuntutan. Dengan demikian sebenarnya juga ada potensi korporasi menyelewengkan sistem ini.

Di Amerika Serikat, Kejaksaan merumuskan struktur penerapan DPA melalui memo untuk mengisi kekosongan hukum formal yang mengatur DPA, yakni: <sup>66</sup>

- 1) *The Holder Memo*: Tahun 1999 asisten JPU Eric Holder merumuskan praktik kesediaan korporasi untuk beerjasama dengan DOJ. Doktrin yang dipakai adalah respondeat superior dimana korporasi harus bertanggung jawab atas tindakan agen terlepas dari apakah perusahaan memiliki kebijakan internal yang melarang tindakan tersebut.
- 2) *The Thompson Memo*: Sebagai respon atas krisis Andersen Deputy JPU Larry Thompson mengeluarkan memo “*Principles of Federal Prosecution of Business Organizations*” sehingga diskresi jaksa menjadi sangat luas, kurangnya transparansi dan berpotensi banyaknya pelanggaran hak konstitusional. Dan di memo ini juga dua hal penting yakni: korporasi yang kooperatif akan diberi keuntungan yang mungkin berdampak pada eksistensinya, dan kooperasi itu harus otentik untuk memastikan manfaat tadi dapat diperoleh.
- 3) *The McNulty Memo*: Memo ini menggantikan dan merevisi Thomson Memo oleh JPU Paul McNulty tahun 2012 dikeluarkan memo “*Principles of Federal of Business Organization*”. Disini pengesampingan hak istimewa pengacara-klien tidak lagi diperlukan untuk melihat sifat kooperatifnya selama diinvestigasi. Tidak banyak

---

<sup>66</sup> Ellis W. Martin, “Deffered Prosecution Agreements: “Too Big To Jail “And The Potential Of Judicial Oversight Combined With Congressional Legislation,” *North Carolina Banking Institute*, vol. 18 (2014), hal. 465-466.

perubahan berarti dari memo ini, terutama power dari jaksa untuk menekan korporasi saat investigasi.

- 4) *The Filip Memo*: Tahun 2008 Deputy JPU Mark Filip merevisi United States Attorney Manual (Memo Filip). Disini jaksa dapat menilai kepatuhan korporasi ketika investigasi dilakukan berdasarkan "*relevant facts*". Hasilnya korporasi masih mungkin membatasi hak istimewa pengacara- klien demi mengungkap fakta tersebut. Hingga kini pedoman DPA masih mengalami kekosongan hukum karena tidak jelas parameter jaksa dalam menentukan kapan korporasi dianggap kooperatif sehingga mungkin melampaui apa yang diizinkan oleh hukum.

Keterlibatan hakim dalam proses DPA berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan korporasi dan jaksa. Korporasi tidak akan diperlakukan terlalu lunak dan jaksa tidak bisa bertindak semena-mena dalam proses DPA. Walaupun demikian pengadilan tidak boleh melakukan intervensi terhadap kedua belah pihak.

Pada 2009 sebagai pedoman jaksa dalam negosiasi DPA. Hasil amandemen UU Speedy Trial mencakup:<sup>67</sup>

- 1) Apakah DPA *fair and reasonable* dalam hubungannya dengan perbuatannya;
- 2) Apakah korporasi pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya;
- 3) Apakah pelaku individu yang terkait perbuatan itu secara individual dituntut;
- 4) Apakah denda akan mencegahnya melakukan perbuatan serupa di masa mendatang dan menghukum perbuatannya yang lalu;
- 5) Apakah korporasi dapat bertahan secara finansial dalam surat dakwaan;
- 6) Apakah korporasi ukuran tindakan pemulihan korporasi yang setidaknya mendorong upaya pencegahan dan pemulihan.

---

<sup>67</sup> Ellis W. Martin, "Deferred Prosecution Agreements: Too Big to Jail" hal. 478.

## **2. POTENSI PENERAPAN *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) DALAM REGULASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA**

### **2.1. DPA dengan Subyek Hukum Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dimana hal tersebut juga telah diterima dalam perundang-undangan kita, khususnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 dimana korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Penanggulangan di sini termasuk adalah dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang telah diambil oleh korporasi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Upaya mempercepat pengembalian kerugian keuangan negara dari tangan korporasi tentu bisa menjadi prioritas kita yang ternyata mengalami masalah dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Salah satunya adalah, karena tidak memperhitungkan adanya "kerjasama" dengan pelaku korupsi yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam mempercepat penyelesaian tindak pidana korupsi itu dan mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Menurut penulis, ketika kita sudah menerima bahwa korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana korupsi dan bertanggungjawab atas perbuatan korupsi itu, maka korporasi dapat dituntut sebagai pelaku, meskipun pengurus dari korporasi itu tidak dituntut untuk korupsi yang dilakukan oleh korporasi itu. Ketika, korporasi sudah menjadi tersangka tindak pidana korupsi maka model seperti *deferred prosecution agreement* dapat digunakan di sini. Jaksa penuntut umum dapat menawarkan suatu penundaan penuntutan kepada korporasi itu untuk tidak menuntutnya ke pengadilan, dengan imbalan korporasi tersebut mengakui perbuatannya dan sepakat sukarela membayar denda serta penggantian kerugian sejumlah tertentu kepada negara. Selain itu, syarat lainnya adalah korporasi itu harus menjalani *corporate compliance program* (program ketaatan korporasi), *the appointment of a corporate monitor or integrity*

*counsel* (penunjukkan pengawas atau penasihat korporasi).<sup>68</sup> Dengan catatan, jika korporasi gagal memenuhi kesepakatan yang telah diikatkan bersama jaksa penuntut umum, maka korporasi itu akan dituntut sebagai Terdakwa ke pengadilan. Dengan model seperti ini, maka penyelesaian tindak pidana korupsi serta pengembalian kerugian keuangan negara dapat lebih cepat dilakukan.

Kejahatan korporasi memang cukup serius terutama berkaitan dengan perekonomian. Investigasi, penuntutan dan peradilannya juga mahal, lambat dan kompleks. Maka diperlukan yang tinggi dalam memidana korporasi. DPA mungkin akan dirasa tidak adil karena dibenarkan menghindari pengadilan dengan membayar sejumlah uang, namun korporasi berbeda dengan manusia karena tidak memiliki akal dan moral sehingga perlu pendekatan yang sesuai pula untuknya. Inovasi yang dimaksud adalah *Deferred Prosecution Agreement*.<sup>69</sup>

## **2.2. Konsep DPA dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Untuk di Indonesia, penerapan instrument DPA ini tidaklah mudah dan pasti akan terjadi pro dan kontra, mengingat DPA berkembang dinegara-negara *common law*. Namun demikian jika ingin membahas tentang DPA lebih serius lagi kedalam sistem pemidanaan di Indonesia maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Indonesia sebenarnya telah mengenal konsep semacam DPA yaitu antara lain, *whistle-blower* yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 yaitu pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun dalam praktiknya terkadang *whistle-blower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. Kemudian dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga mengenal istilah *justice collaborator*. Pengertian dari konsep tersebut termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4

---

<sup>68</sup> <https://www.breedinglaw.com/Articles/Deferred-prosecution-for-individuals.shtml> diakses pada 17 Mei 2020.

<sup>69</sup> Michael Bisgrove dan Mark Weekes. *Op. cit.* Hlm. 1.

Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle-blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*).

Selanjutnya penulis akan menguraikan perbedaan antara pelaksanaan yang ada pada saat ini di Indonesia yakni pada KUHAP dan pada DPA yang penulis rangkum dalam bentuk tabel perbandingan sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan KUHAP dan *Deferred Prosecution Agreement***

No.	Poin	KUHAP	<i>Deferred Prosecution Agreement (DPA)</i>
1	Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	<i>Federal Rules of Criminal Procedure</i>
2	Subyek Hukum	Manusia dan Korporasi	Korporasi
3	Pemberlakuan	Semua Tindak Pidana	Tindak Pidana Korporasi/Kejahatan Korporasi
4	Bentuk	Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada Terdakwa berdasarkan BAP dari Penyidik.	Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dengan Jaksa Penuntut Umum melakukan negosiasi yang membahas tentang kebijakan penuntut umum untuk menghentikan perkara yang diduga dilakukan oleh korporasi, jika hakim sudah menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh jaksa ( <i>prosecutor</i> ) dengan terdakwa dan/atau penasehat hukumnya.
5	Pembuktian	Pada proses persidangan hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan apakah dia benar-benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, termasuk untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa. Terdakwa juga diberikan hak untuk memberikan keterangannya atas	Apabila pernyataan bersalah terdakwa telah diterima oleh pengadilan dan hakim sudah menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa dan/atau penasehat hukumnya, maka korporasi tersebut mengakui perbuatannya dan sepakat sukarela membayar denda serta penggantian kerugian sejumlah tertentu kepada negara. Selain itu,



		tuduhan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.	syarat lainnya adalah korporasi itu harus menjalani <i>corporate compliance program</i> (program ketaatan korporasi), <i>the appointment of a corporate monitor or integrity counsel</i> (penunjukkan pengawas atau penasihat korporasi). Dengan catatan, jika korporasi gagal memenuhi kesepakatan yang telah diikatnya bersama Jaksa Penuntut Umum, maka korporasi itu akan dituntut sebagai Terdakwa ke pengadilan.
6	Dasar Putusan Hakim	Dasarnya ada pada proses pembuktian dalam persidangan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama proses pembuktian.	Dasarnya ada pada hasil kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.

Berdasarkan tabel perbandingan yang telah penulis uraikan diatas, nampak jelas perbedaan mekanisme yang ada di KUHAP saat ini dan DPA. Dimana proses peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP saat ini memerlukan proses yang panjang dalam penyelesaiannya, sehingga permasalahan penumpukan perkara hingga saat ini belum dapat terselesaikan dan proses peradilan pidana tidak berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana amanat undang-undang bahwasanya pelaksanaan proses peradilan pidana dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Skema yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia untuk menerapkan DPA adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. DPA yang akan diterapkan di Indonesia harus mempertimbangkan sistem peradilan Indonesia, susunan konstitusional dan tradisi hukum. Peran pengadilan dalam

<sup>70</sup> Febby Mutiara Nelson. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Op.cit. Hlm. 357.

proses DPA harus menjadi pertimbangan mengingat adanya doktrin pemisahan kekuasaan dan ketentuan konstitusi terkait peran dan fungsi pengadilan. Harus pula dipertimbangkan dampak beban *regulatory and compliance* bagi korporasi yang membutuhkan biaya tambahan sehingga Indonesia perlu membandingkan apakah jalur formal dari DPA yang lebih ekonomis dan efektif;

- b. Kejahatan yang dapat menggunakan mekanisme DPA, adalah termasuk kejahatan serius termasuk (tapi tidak terbatas) *fraud, bribery and money laundering*. Kemudian, apakah perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengatur hal itu ataukah dimasukkan dalam undang-undang lain;
- c. Jika DPA hanya diberlakukan bagi korporasi maka ada kesempatan untuk memberikan efek pencegahan dan kemungkinan menuntut karyawan (organ perusahaan). Namun jika terbatas pada korporasi, maka timbul kemungkinan individu telah berbuat kejahatan tapi enggan melapor karena takut akan dipidana. Mekanisme DPA harusnya mencakup pegawai korporasi juga;
- d. Peran pengadilan akan sangat penting bagi DPA Indonesia. keterlibatan yudisial dalam DPA sebenarnya dapat meningkatkan kepercayaan. Diskresi tidak perlu terlalu luas seperti di Amerika Serikat tapi juga jangan terlalu hati-hati (lambat seperti Inggris);
- e. Keberhasilan DPA akan sangat dipengaruhi oleh kemauan dan daya tarik self reporting. Kepastian dan prediktabilitas proses DPA juga diperlukan. Langkah untuk mencapai kepastian mencakup dapat diawali dari penegak hukum dalam menentukan persyaratan DPA, faktor atau alasan jaksa mengajak korporasi memasuki DPA (misal di Inggris dikenal *reasonable suspicion*, kepentingan publik, dsb). Kepentingan publik juga harus dipertimbangkan: pencegahan perbuatan dimasa mendatang, menghemat dana menuntut dan mengadili, adanya restitusi bagi korban, keseriusan pelanggaran, riwayat korporasi (sejarah residif, praktek bisnis dan kepatuhan, pelaporan diri, level pelaku (*agency*) apakah tinggi atau tidak, dan kaitannya dengan pihak ketiga;
- f. DPA harus dibuat seimbang antara kepentingan membangun kepercayaan publik dan juga kepentingan untuk mengejar korporasi yang curang;
- g. Di Amerika Serikat hasil *assessment internal* korporasi bisa dipercayai dan digunakan untuk negosiasi. Disatu sisi ini memang membantu SDM negara, tetapi disisi lain validitas dan akurasi informasi itu juga dipertanyakan. Maka dari itu perlu ditentukan parameter atau point-point fakta yang

harus disampaikan oleh korporasi. Selanjutnya mengenai negosiasi di Amerika Serikat dan Inggris bisa dipakai untuk menuntut korporasi (terkait kepastian);

- h. Pelanggaran terhadap DPA memungkinkan korporasi dikenai denda dan bahkan dituntut ke pengadilan formal. Pengawasan dilakukan oleh independen yang ditunjuk terdakwa dan disetujui oleh negara; dan
- i. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, skema DPA Indonesia dapat mensyaratkan persyaratan kesepakatan untuk kepentingan publik dan bersikap adil, masuk akal dan proporsional. Hukuman harus sesuai dan proporsional. Selanjutnya memastikan pendanaan dan sumber daya yang memadai untuk kejahatan korporasi yang kompleks sangat penting. Dengan menggunakan beberapa dana pemulihan untuk kegiatan penegakan hukum lebih lanjut dapat dipertimbangkan dalam konteks skema Indonesia yang mungkin terjadi, walaupun potensi konflik kepentingan mungkin timbul jika agen tersebut menjadi penerima manfaat dari kesepakatan yang mereka negosiasikan. Konflik semacam itu bisa dikurangi dengan adanya panduan yang jelas mengenai bagaimana DPA akan dinegosiasikan dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Sementara itu, negosiasi yang dilakukan JPU dan Korporasi dalam proses DPA, dapat mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Pernyataan fakta yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran;
- b. Jaminan akurasi informasi yang diberikan selama negosiasi;
- c. Jaminan bahwa itikad baik dari para yang membuat kesepakatan;
- d. Sebuah pengakuan atas bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan jika mengulangi dalam periode kesepakatan bahwa mereka dapat diadili;
- e. Kewajiban untuk kooperatif dengan investigasi saat ini atau yang akan datang;
- f. Konsekuensi bagi Terdakwa jika melakukan kesalahan lebih lanjut;
- g. Larangan bagi Terdakwa untuk membuat pernyataan factual yang bertentangan dengan kesepakatan;
- h. Tanggal daluarsa;
- i. Persyaratan seperti:
  - (1) Pembayaran denda keuangan;
  - (2) Pembayaran biaya yang wajar dari penuntut;
  - (3) Kompensasi untuk korban;

---

<sup>71</sup> *Ibid.* Hlm. 359.

- (4) *Pencelaan* untuk setiap keuntungan yang dibuat dari kesalahan; dan/atau
- (5) Tidak ada pembayaran bonus; dan
- (6) Menerapkan atau memperbaiki program kepatuhan perusahaan dan /atau restitusi terhadap korban.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis berpendapat bahwasanya perlu adanya perencanaan serta pembahasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengadaptasi model DPA dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sebagaimana model ini berdasarkan ketentuan dalam UNCAC yang menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan dengan memberikan pengurangan hukuman bagi tersangka/terdakwa yang mau bekerjasama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan penegak hukum. Selain itu, model ini juga tetap menganut tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Model ini juga tetap berada pada jalur penyelesaian melalui sistem peradilan pidana.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dalam mekanisme DPA di Amerika Serikat, tahapan negosiasi dilakukan sebelum persidangan atas diskresi jaksa, terdakwa secara sukarela melakukan negosiasi dengan jaksa untuk menanggulangi kejahatan korporasi. Yang menjadi pertimbangan jaksa adalah dampak terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah bila tuntutan pidana dilakukan. Keterlibatan hakim dalam proses DPA berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan korporasi dan jaksa. walaupun demikian pengadilan tidak boleh melakukan intervensi terhadap kedua belah pihak. Model DPA di Indonesia ke depan juga mesti sesuai dengan kondisi dimana masyarakat masih ada keraguan pada kredibilitas penegak hukum, oleh sebab itu model yang ada harus terbuka, harus bisa diawasi, harus diperkuat akuntabilitasnya, setiap kesepakatan yang didapat harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

## 2. Saran

Model DPA yang tepat untuk dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi di Indonesia serta implikasinya perlu disiapkan dan dirancang dengan baik, jika kita dapat menerima praktik ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya pada tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara. Model ini tentu harus sesuai dengan budaya hukum Indonesia, sesuai dengan kondisi dalam sistem peradilan pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Mukthie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Mokhammad Najih dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Lawrence M. Friedman. 1977. *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- M. Faal. 2005. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Febby Mutiara Nelson. 2020. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung. Widya Padjadjaran.
- Indriyanto Seno Adji. 2005. *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bandung. Putra Abardin.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. Rajawali Press.
- Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta. Kencana.
- Ermansyah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana.



Polly. Sprenger. 2011. *Deferred Prosecution Agreement: The Law And Practice Of Negotiated Corporate Criminal Penalties*. London: Thomson Reuters. CPT Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Grup.

Bryan A.Garner. 2009. *Black Law Dictionary, Ninth Edition*. USA. West Publishing Co.

J. David Reitzel, et. al. 1994. *Contemporary Business Law and The Legal Enviroment: Principles and Cases*. New York. McGraw-Hill, Inc.

2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

## JURNAL

Timothy A. Falade Obalade, "Analysis of Corporate Corruption in the USA: A Descriptive Overview of Recent History," *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 4 No. 5; March 2014.

Sharon Oded, "Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance In Times Of Economic Meltdown," *The Journal of Social Justice*, Vol. 2; 2011.

Christopher A. Wray dan Robert K. Hur, "Corporate Criminal Prosecution in a Post-Enron World: the Thompson Memo In Theory And Practice," *American Criminal Law Review*, Vol. 43; 2006.

Ellis W. Martin, "Deffered Prosecution Agreements: "Too Big To Jail "And The Potential Of Judicial Oversight Combined With Congressional Legislation," *North Carolina Bangking Institute*, Vol. 18; 2014.

Michael Yangming Xiao, "Deferred/Non Prosecution Agreements: Effective Tools To Combat Corporate Crime," *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 23 No. 233; 2013.

David M.Uhlmann, "Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements and the Erosion of Corporate Criminal Liability," *Maryland Law Review*, Vol. 72, Issue 4, Article 15; 2013.

## INTERNET

<https://www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-protocols/deferred-prosecution-agreements/>, diakses pada 21 Februari 2020.

<http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm/-abstract-id=1444543>, diakses 16 April 2020.

<http://www.icclr.Law.ubc.ca/Publication/Reports/Corporate Criminal.pdf>, diakses 15 Maret 2020.

[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=591202](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=591202), diakses pada tanggal 16 April 2020.

<http://www.gibsondunn.com/publications/Documents-/2010Year-End-Update-CorporateDeferredProsecutionAndNon-ProsecutionAgreements.pdf>, diakses pada 17 Februari 2020.

<https://www.breedinglaw.com/Articles/Deferred-prosecution-for-individuals.shtml>, diakses pada 17 Mei 2020.

## ARTIKEL

Michael Bisgrove dan Mark Weekes. 2014. *Deferred Prosecution Agreement: a Practical Consideration. Criminal Law Review*.

Constatino Grasso. *Peaks And Troughs Of The U.K. Deferred Prosecution Agreement*.

Public Consultation Paper, Australian Government/Attorney-General Departement. Maret 2016. *Improving Enforcement Options for Serious Corporate Crime: Consideration of a Deffered Prosecution Agreements Scheme in Australia*.

Cindy R. Alexander dan Mark A. Cohen. *Non-Prosecution, Deffered Prosecution, and Plea Agreements in the Settlement of Alleged Corporate Criminal Wrongdoing*.